

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago Y.S, Amran, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 1989).
- Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980).
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Z, Zulchaina, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pres, 1992).
- Muljono, Liliawati, Euginia, Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Havarindo, 1998).
- Meliala, A, Qirom dan Sumaryono, E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- No Name, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sekilas Tentang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (Jakarta: 1989).
- _____, Sejarah Ringkas Sistem Pemasyarakatan, (Jakarta: 1997).
- Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 1995).
- Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985).
- Simanjuntak, B, Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Bandung: Alumni, 1984).

S.A, Gunakarya, A, Widiada, Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan, (Bandung: Armico, 1988).

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1981).

Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Walgito, Bimo, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1988).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warya Nomor: DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 Tentang Buku Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: E.Ps.01.10-166 Tanggal 26 Juni 1985 Perihal Penempatan Narapidana, Anak Negara Dan Anak Sipil.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HN.02.01 tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Bermasalah.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.01
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PK.04.02
Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PR . 07.03
Tahun 1991 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Lembaga
Pemasyarakatan Jawa Tengah Dari Ambarawa Ke Kutoarjo Dan
Penghapusan Cabang Rumah Tahanan Negara Di Kutoarjo.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.06-PK.04.10 Tahun 1992
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan
Cuti Menjelang Bebas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak.

Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Tanggal 19 Oktober 1998
Tentang Penetapan Penggunaan Pesawat Televisi untuk Anak Didik.

Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.04.10-168 Tanggal 31
Agustus 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti
Menjelang Bebas.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pemasyarakatan Nomor:
E.PK.04.03-144 Tanggal 16 November 1999 Perihal Pelaksanaan
Program Cuti Mengunjungi Keluarga.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.PK.04.05-158
Tanggal 14 Desember 1999 Perihal Peningkatan Pemberian Pembebasan
Bersyarat.

Surat Keputusan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor: W.9-PK.04.10-56
tanggal 15 Februari 2000 Perihal Persyaratan dan Kelengkapan Berkas
Usulan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas.